

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Kaimana

A Heinrich^{*1}, A N Probohudono²

¹ Program Studi Magister Akuntansi, Universitas Sebelas Maret

² Program Studi Akuntansi, Universitas Sebelas Maret

E-mail: heinrichangela02@gmail.com¹, anprobohudono@staff.uns.ac.id²

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi dampak dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Sampel penelitian terdiri dari 119 responden yang berasal dari 38 Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Kaimana, yang terdiri dari pimpinan OPD, Kasubbag keuangan, bendahara, dan APIP/Auditor Internal. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi memiliki dampak yang signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Penelitian ini memiliki implikasi teoritis untuk perkembangan literatur akuntansi dalam bidang kualitas laporan keuangan. Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah menjadi referensi dalam pengambilan keputusan kebijakan yang berhubungan dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Peran pemerintah dalam mengatur regulasi terkait dengan SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi dianggap penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan untuk mengembangkan sampel penelitian yang lebih luas, menambahkan variabel independen, dan mempertimbangkan penggunaan pendekatan metode kualitatif atau metode campuran dalam penelitian masa depan.

Kata Kunci: sistem pengendalian intern pemerintah; pemanfaatan teknologi informasi; kualitas laporan keuangan

Abstract. The purpose of this study was to evaluate the impact of the Government Internal Control System (SPIP) and the utilisation of information technology on the quality of financial reports in the Kaimana Regency Local Government. The research sample consisted of 119 respondents from 38 Regional Apparatus Organisations in Kaimana Regency, consisting of OPD leaders, Head of the finance subdivision, treasurer, and APIP / Internal Auditor. The research method used in this research is multiple regression analysis using SPSS software. The results showed that the SPIP)and the use of information technology have a significant and positive impact on the quality

of financial reports in the Kaimana Regency Local Government. This research has theoretical implications for the development of accounting literature in the field of financial statement quality. Practically, this research can be useful for the government to be a reference in making policy decisions related to improving the quality of financial statements. The role of the government in regulating regulations related to SPIP and the use of information technology is considered important to produce quality financial reports. Future researchers are advised to consider developing a wider research sample, adding independent variables, and considering the use of qualitative or mixed method approaches in future research.

Keywords: *government internal control system; information technology utilisation; financial report quality*

1. Pendahuluan

Pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur urusan pemerintahan secara mandiri dan untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, harus disertai dengan pelimpahan keuangan yang transparan dan akuntabel. Hal ini penting untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah, serta meminimalkan risiko korupsi dan penyalahgunaan keuangan daerah.

Implementasi otonomi daerah dihadapkan pada sejumlah tantangan, khususnya dalam aspek *good governance*. *Good governance* merujuk pada pengelolaan pemerintahan yang bertanggung jawab, demokratis, efisien, terdisiplin dalam penggunaan anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik yang mendorong perkembangan sektor swasta. Konsep *new public management* (NPM) terdiri atas tujuh komponen utama. Pertama, penerapan manajemen profesional pada sektor publik. Kedua, penggunaan standar kinerja dan ukuran kinerja yang jelas. Ketiga, penekanan yang lebih besar terhadap pengendalian output dan outcome. Keempat, desentralisasi unit-unit kerja di sektor publik. Kelima, menciptakan persaingan di sektor publik. Keenam, mengadopsi gaya manajemen bisnis ke dalam sektor publik. Dan ketujuh, penekanan pada disiplin dan penghematan dalam penggunaan sumber daya. Dalam hal ini, NPM dapat dianggap sebagai pendekatan terpadu dalam merancang dan menjalankan manajemen sektor publik yang responsif, efektif, dan efisien, dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta prinsip *good governance* [1].

Penelitian menemukan bahwa atribut-atribut pengawasan seperti mekanisme pengendalian internal merupakan faktor penentu utama dari kualitas laporan keuangan [2]. Penelitian tersebut juga menjeleaskan bahwa penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan secara statistik terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan data dari IHPS I Tahun 2022, opini LKPD mengalami perbaikan dalam 5 tahun terakhir dengan peningkatan opini WTP dan penurunan opini WDP. Namun, temuan hasil pemeriksaan BPK pada 541 LKPD tahun 2021 menunjukkan kelemahan sistem pengendalian intern yang menjadi penyebab beberapa masalah. Kegagalan manajemen dalam menghargai pentingnya sistem pengendalian intern menyebabkan kelemahan tersebut. BPKP mengeluarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah untuk menilai penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah.

BPKP melakukan penilaian maturitas terhadap SPIP untuk menilai kematangan sistem pengendalian intern pemerintah. Kerangka Maturitas SPIP terdiri dari enam tingkatan, dimulai dari level 0 hingga level 5. Organisasi yang memiliki pengendalian internal yang matang memiliki rancangan pengendalian yang tepat dan melaksanakan rancangan tersebut secara efektif. Implementasi dan internalisasi SPIP di KLD menjadi prioritas dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Pengendalian internal harus melekat dalam setiap kegiatan untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Kabupaten Kaimana berada di wilayah Provinsi Papua Barat, dengan 7 Distrik/Kecamatan, 2 Kelurahan, dan 84 Kampung/Desa. Inspektorat Kabupaten Kaimana bertanggung jawab atas pengawasan yang luas, namun SDM yang minim menyulitkan pelaksanaannya. Total SDM Aparatur yang dimiliki hanya sekitar 2.500 orang, termasuk guru dan perawat. Meskipun Pemerintah Kabupaten Kaimana telah memperoleh Opini WTP sebanyak 9 kali dari BPK [3], penerapan SPIP masih lemah dengan maturitas yang rendah. Laporan keuangan daerah memerlukan konsultan dari BPKP, dan SAKIP Kabupaten Kaimana saat ini berada di posisi "C". Meskipun Opini BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah "Wajar Tanpa Pengecualian", masih ada ketidakpatuhan dari OPD dalam pengelolaan keuangan. Temuan IHPS I tahun 2022 menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern masih lemah, terutama dalam hal pemanfaatan sistem informasi dan pelaporan serta kekurangan sumber daya manusia dan pengawas intern yang tidak optimal [4]. Penelitian [5] menemukan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Pemanfaatan teknologi informasi memoderasi hubungan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Organisasi sektor publik memiliki tanggung jawab sebagai agen untuk menyajikan informasi keuangan yang berkualitas dan bermanfaat bagi pengguna laporan dan masyarakat luas sebagai principal [6]. Hubungan antara pemerintah sebagai agen dan pengguna informasi keuangan sebagai prinsipal dapat menimbulkan permasalahan keagenan jika keduanya mengutamakan keuntungan. Permasalahan keagenan yang dapat terjadi antara lain konflik kepentingan dan informasi asimetris. Konflik kepentingan muncul karena tujuan yang berbeda antara prinsipal dan agen, sedangkan informasi asimetris terjadi karena adanya perbedaan akses informasi antara kedua belah pihak [7]. Agen memiliki informasi yang lebih akurat mengenai posisi keuangan dan hasil operasi entitas daripada principal.

Rashid, dkk. [8] berpendapat bahwa salah satu tujuan terpenting dari standar pelaporan keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi dalam menyediakan laporan keuangan. Di Indonesia, terdapat hubungan keagenan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen, dimana pemerintah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya yang dipercayakan oleh masyarakat. Pertanggungjawaban oleh pemerintah dilakukan melalui Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Laporan keuangan perlu memenuhi syarat karakteristik kualitatif tersebut agar laporan keuangan berkualitas tinggi [9]. Laporan keuangan yang berkualitas tinggi ini, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD. Dalam pasal 16 ayat 1 UU No. 15 tahun 2004, opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.

Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan [10]. Pemanfaatan teknologi informasi juga mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan daerah, yang dapat disajikan secara tepat waktu, akurat, lengkap, dan relevan [11, 12, 13, 14, 15]. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi diatur dalam PP Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk memudahkan pengelolaan pemerintahan dari manual menjadi terkomputerisasi. Pemerintah daerah Kabupaten Kaimana telah memanfaatkan *e-Government* untuk meningkatkan beberapa aktivitas pelayanan publik, seperti aplikasi SIKDA Generik, E-Berpadu, dan SIMDA. Penelitian [16] menemukan bahwa sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pada pemerintah daerah [17, 18, 19, 20, 21]. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana.

Sistem Pengendalian Intern (SPI) merupakan salah satu elemen penting dalam struktur organisasi yang digunakan untuk mengawasi aktivitas entitas oleh manajemen guna memastikan terlaksananya tata kelola yang baik. SPI merupakan bagian integral dari proses manajemen Perusahaan Terbuka yang dibentuk untuk memberikan keyakinan memadai bahwa operasi dilakukan dengan efisiensi dan efektivitas [22].

2. Metode

Penelitian ini membuktikan pengaruh SPIP, pemanfaatan teknologi informasi, dan peran apip terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kaimana. Pengujian hipotesis dilakukan dengan model regresi linear berganda dengan aplikasi statistik SPSS. Populasi adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kaimana. Sampel dari penelitian ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*. Responden yang dipilih adalah pejabat fungsional auditor (PFA) dan pejabat struktural yang melakukan fungsi pengawasan karena ketiganya melakukan fungsinya sebagai auditor internal Pemda. Pejabat bagian keuangan seperti (Kepala Sub Bagian Keuangan, Pengelola keuangan dan Bendahara).

2.1. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

2.1.1. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan diukur dengan karakteristik laporan keuangan yang berkualitas Nkundabanyanga, dkk. [32] yang berisi 18 pernyataan dengan mengadopsi indikator dari SFAC Nomor 8 tentang *qualitative characteristic of useful financial information* yaitu relevan, andal, akurat, dapat dipahami dan dapat dibandingkan.

2.1.2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

PP Nomor 60 tahun 2008 indikator unsur-unsur SPIP yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan.

2.1.3. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi menggunakan indikator Thompson, dkk. [33] terdiri insensitas pemanfaatan (*intensity of use*), frekuensi pemanfaatan (*frequency of use*) dan jumlah aplikasi atau software yang digunakan (*diversity of software package used*).

2.2. Hipotesis

2.2.1. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

SPIP adalah proses untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan. Pemimpin/atasan menggunakan SPIP untuk memberikan arahan dan mencegah penggelapan atau kecurangan. SPIP yang lemah meningkatkan risiko kesalahan, ketidakakuratan, dan kecurangan dalam laporan keuangan. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditingkatkan oleh SPIP yang kuat yang mampu meminimalkan penyimpangan atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Semakin baik SPIP, semakin tinggi kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Beberapa penelitian [23, 24, 25] menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan dari sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. Indriasari dan Nahartyo [26] juga membuktikan secara empiris bahwa pengendalian internal akuntansi pemerintah daerah berpengaruh terhadap ketepatanwaktuan dan keterandalan laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem pengendalian intern didesain untuk memastikan keandalan dan ketelitian data akuntansi, dan jika pengendalian internal tidak efektif, maka kualitas pelaporan keuangan akan menurun [27]. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁: Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

2.2.2. *Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana*

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengembangkan dan memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyediakan informasi keuangan kepada publik. Pemanfaatan teknologi informasi yang optimal dapat membantu membangun jaringan sistem informasi manajemen dan mempermudah akses antar unit kerja, sehingga pemerintah dapat bekerja secara terpadu. Penggunaan teknologi informasi juga dapat mempercepat proses pengolahan data transaksi dan sistem informasi keuangan pemerintah daerah. Beberapa literatur juga menyebutkan bahwa semakin kompleksnya transaksi dan volume dalam pengelolaan keuangan daerah, semakin penting pemanfaatan teknologi informasi.

Bodnar & Hodwood [28] menyebutkan bahwa pengembangan sistem informasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas informasi, menguatkan pengendalian intern dan meminimalkan biaya. Hasil penelitian [29] menemukan bahwa penggunaan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Wibawa, dkk. [30] juga menunjukkan hasil yang sama bahwa pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Nurillah & Muid [31] menyatakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi, maka semakin tinggi pula kualitas laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Kaimana telah memanfaatkan teknologi dalam beberapa aktivitas untuk meningkatkan pelayanan publik, seperti aplikasi SIKDA Generik (Sistem Informasi Kesehatan Daerah Generik) yang berbasis elektronik untuk pelayanan kesehatan, aplikasi E-Berpadu untuk administrasi hukum, dan aplikasi SIMDA untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah. Berdasarkan dari uraian di atas maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Pengaruh Pemanfaatan Teknologi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana

2.3. *Metode Pengumpulan dan Analisis Data*

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer, seperti dengan cara pemberian pernyataan berupa kuesioner, observasi, wawancara dan dokumentasi secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan statistik deskriptif dan pengujian hipotesis analisis regresi berganda. Pengujian dilakukan menggunakan bantuan program SPSS. Syarat untuk melakukan pengujian regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data penelitian valid, tidak bias, konsisten, dan taksiran koefisien regresinya efisien. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah model umum persamaan regresi berganda dan pengolahan datanya menggunakan alat bantu statistik software SPSS.

$$LKPD = \alpha + \beta_1 SPIP + \beta_2 TI + \varepsilon \quad (1)$$

Keterangan:

LKPD	= Kualitas Laporan Keuangan Pemda
SPIP	= SPIP
TI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
α	= Konstan
$\beta_1 - \beta_2$	= Koefisien regresi
ε	= Error

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Deskriptif Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kaimana. Jumlah OPD di Kabupaten Kaimana sebanyak 38 OPD. Sampel terdiri dari pimpinan OPD, auditor internal, kepala sub bagian keuangan dan bendahara pada organisasi perangkat daerah (OPD) Kabupaten Kaimana. Total responden yang diperoleh yaitu sebanyak 119 responden. Berikut ini sebaran kuesioner di 38 OPD di Kabupaten Kaimana yang dapat dilihat pada Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar OPD Kabupaten Kaimana

No	Nama OPD	Jumlah Kuesioner
1	Sekretariat Daerah	3
2	Sekretariat DPRD	3
3	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	3
4	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3
5	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	2
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3
8	Badan Pendapatan Daerah	2
9	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	2
10	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, perkebunan dan Peternakan	3
11	Inspektorat Daerah	24
12	Dinas Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman	3
13	Dinas Kesehatan	3
14	Dinas Pemadam Kebakaran	2
15	Dinas Lingkungan Hidup	3
16	Dinas Perhubungan	3
17	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	3
18	Dinas Pencatatan Sipil dan dan Kependudukan	3
19	Dinas Sosial dan Keluarga Berencana	3
20	Dinas Perikanan	2
21	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
22	Satuan Polisi Pamong Praja	2
23	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	3
24	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah	3
25	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3
26	Badan Kesatuan Bangsa	2
27	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	3
28	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3
29	Distrik Kaimana	3
30	Distrik Kambrau	2
31	Distrik Arguni Bawah	2
32	Distrik Teluk Arguni	2
33	Distrik Buruway	2
34	Distrik Yamor	2
35	Distrik Teluk Etna	2
36	Kelurahan Kaimana	2
37	Kelurahan Krooy	2
38	Rumah Sakit Umum Daerah	2

3.2. Deskripsi Data

Karakteristik responden dalam penelitian ini yaitu diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan jabatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

3.2.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Responden diksifikasikan dengan karakteristik berdasarkan jenis kelamin yang dapat dilihat pada Tabel 2 di bawah ini:

Tabel 2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-Laki	70	58,8
Perempuan	49	41,2
Jumlah	119	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan jenis kelamin, responden pada OPD Kabupaten Kaimana adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 70 orang (58,8%) dan yang berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 49 orang atau (41,2%).

3.2.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Responden diksifikasikan dengan karakteristik berdasarkan usia yang dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3. Karakteristik Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah	Persentase (%)
25-40 Tahun	32	26,9
41-55 Tahun	75	63,0
>55 Tahun	12	10,1
Jumlah	119	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pendidikan, responden pada OPD Kabupaten Kaimana mayoritas berpendidikan S1 sebanyak 55 orang (46,2%), yang berpendidikan SMA sebanyak 44 orang atau (37,0%), yang berpendidikan S2 sebanyak 15 orang atau (12,6%) Sedangkan yang berpendidikan Diploma sebanyak 5 orang atau (4,2%).

3.2.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jabatan

Responden diklasifikasikan dengan karakteristik berdasarkan jabatan yang dapat dilihat pada Tabel 4 di bawah ini:

Tabel 4. Karakteristik Berdasarkan Jabatan

Jenis Kelamin	Jumlah	Presentase (%)
Pimpinan OPD	37	31,1
Kasubag Keuangan	23	19,3
Bendahara	38	31,9
APIP/Auditor Internal	21	17,7
Jumlah	119	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan Jabatan, responden pada OPD Kabupaten Kaimana mayoritas Bendahara yaitu sebanyak 38 orang atau (31,9%), Pimpinan OPD sebanyak 37 orang atau

(31,1%), Kasubag Keuangan berjumlah 23 orang atau (19,3%). Sedangkan APIP atau Auditor Internal sebanyak 21 orang atau (17,7%).

3.3. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai data dalam penelitian ini yaitu jumlah data (N), nilai tertinggi (*maximum*), nilai terendah (*minimum*), nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi yang menggambarkan penyebaran data. Secara ringkas, analisis statistik deskriptif dijelaskan dalam Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Statistik Deskriptif

Variable	Obs.	Mean	Max.	Min.	Std. Dev.
Kualitas Laporan Keuangan	119	70.70	92	49	6.735
SPIP	119	41.42	56	28	4.948
Pemanfaatan TI	119	36.59	51	25	5.122

Tabel di atas menunjukkan bahwa kecenderungan persepsi kualitas laporan keuangan yang memiliki nilai mean atau rata-rata yang cukup tinggi. Artinya, sebagian besar responden memilih setuju.

3.4. Uji Validitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa tiap item pernyataan pada variable mempunyai nilai r hitung yang lebih besar dari nilai r tabel. Nilai r tabel dan r hitung dapat dilihat pada Tabel 6. Dapat disimpulkan bahwa seluruh item pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid dengan nilai r hitung > r tabel.

Tabel 6. Uji Validitas

Variabel	r tabel	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.195	Valid
SPIP (X1)	0.195	Valid
Pemanfaatan TI (X2)	0.195	Valid

3.5. Uji Reliabilitas

Ketiga variabel menunjukkan nilai >0.60 yang menyimpulkan bahwa ketiga variabel yang digunakan dalam penelitian ini datanya reliabel. Tabel 7 menunjukkan hasil uji reliabilitas 3 variabel.

Tabel 7. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	0.917	Reliabel
SPIP (X1)	0.928	Reliabel
Pemanfaatan TI (X2)	0.872	Reliabel

3.6. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas dan uji multikolinearitas

3.6.1. Uji Normalitas

Tabel 8 menunjukkan hasil uji normalitas Kolmogorov- Smirnov. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-smirnov menunjukkan bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi uji asumsi klasik normalitas dengan nilai signifikansi $0.094 > 0.05$

Tabel 8. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

N	Test Statistic	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan
Unstandardized Residual	0.075	0.094	Berdistribusi Normal

3.6.2. Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian seperti pada Tabel 9 menunjukkan bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini tidak terdapat asumsi multikolinearitas yang ditunjukkan dengan nilai tolerance yang lebih dari 0.1 dan nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 9. Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
SPIP (X1)	0.228	4.392	Tidak ada multikolinearitas
Pemanfaatan TI (X2)	0.344	2.903	Tidak ada multikolinearitas

3.7. Pengujian Goodness of Fit Test

3.7.1. Pengujian Koefisien Determinasi (R Square)

Nilai R Square = 0.768 (62,8%) Model dapat menjelaskan variabel dependen sebesar 76,8% sedangkan sisanya 23,2% dijelaskan variabel lain di luar model penelitian yang berpengaruh terhadap variabel kualitas laporan keuangan. Tabel 10 menunjukkan nilai R square dan adjusted R square

Tabel 10. R Square

R	R Square	Adjusted R Square
0.768	0.590	0.583

3.7.2. Pengujian Simultan

Tabel 11 menunjukkan hasil uji F dengan nilai F hitung adalah 83.585 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai signifikansi lebih kecil dari 5%. Dapat dikatakan bahwa model penelitian fit dan variabel SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dengan tingkat keyakinan 95%.

Tabel 11. Uji Simultan (F-Test)

Model	Sum of Squares	F	Sig.	Hasil Pengujian
<i>Regression</i>	3160.223	83.585	0.000	Signifikan

3.7.3. Pengujian Parsial

Berdasarkan hasil pengajuan di atas, Tabel 12 menjelaskan bahwa

- 1) Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengujian pada hipotesis pertama (H1) memiliki nilai t hitung 5.768 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (sig < 0.05) sehingga H1 diterima.
- 2) Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Pengujian pada hipotesis kedua (H2) yang memiliki nilai t hitung 4.540 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (sig < 0.05) sehingga H2 diterima.

Tabel 12. Uji Parsial (t-test)

Keterangan	Beta	t	Sig.	Hasil Pengujian
<i>constant</i>	25.212	7.114	0.000	
SPIP	0.637	5.768	0.000	Berpengaruh positif
Pemanfaatan TI	0.485	4.540	0.000	Berpengaruh positif

3.8. Model Regresi

Persamaan regresi linear adalah sebagai berikut:

$$\text{LKPD} = 25.212 + 0.637 (\text{SPIP}) + 0.485 (\text{IT}) + e$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda di atas dapat diartikan bahwa:

- 1) Nilai konstanta sebesar 25.212. Hal ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independent konstan, maka kualitas laporan keuangan adalah sebesar 25.212.
- 2) Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel SPIP adalah 0.637. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan penerapan SPIP sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0.637 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.
- 3) Berdasarkan hasil uji regresi diketahui bahwa nilai koefisien regresi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 0.485. Hal ini menunjukkan bahwa jika ada penambahan pemanfaatan teknologi informasi sebesar satu satuan, maka kualitas laporan keuangan akan meningkat sebesar 0.485 satuan dengan asumsi variabel lainnya tetap.

3.9. Pembahasan

3.9.1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan yaitu pada hipotesis pertama yang memiliki nilai t hitung sebesar 5.768 dengan signifikansi sebesar 0.000 ($\text{sig} < 0.05$) sehingga H1 diterima. Ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Kaimana. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya [23, 24, 25] yang menemukan pengaruh positif dari sistem pengendalian internal pada instansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu proses yang telah direncanakan dengan tujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap tercapainya efektivitas dan efisiensi tujuan organisasi, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPIP juga memungkinkan pemimpin/atasan untuk memberikan arahan dan mengawasi sumber daya organisasi guna mencegah tindakan penggelapan atau kecurangan. Adanya kelemahan pada SPIP suatu organisasi dapat meningkatkan risiko terjadinya kesalahan, ketidakakuratan, atau kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh SPIP terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Kaimana. Hal ini mengimplikasikan bahwa SPIP yang telah diimplementasikan di Kabupaten Kaimana merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Faktanya, laporan keuangan pemerintah kabupaten Kaimana sering mendapatkan opini WTP dari BPK.

Dengan kata lain, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh organisasi sangat tergantung pada efektivitas implementasi SPIP dan pengendalian internal yang dilakukan secara baik. Jika SPIP tidak dilaksanakan secara masif dan pengendalian internal tidak berjalan dengan baik, maka kualitas laporan keuangan akan terpengaruh. Oleh karena itu, penting untuk melakukan implementasi SPIP secara masif dan memastikan pengendalian internal dilakukan dengan baik untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

3.9.2. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan yaitu pada hipotesis kedua yang memiliki nilai t hitung sebesar 4.540 dengan signifikansi sebesar 0.000 ($\text{sig} < 0.05$) sehingga H2 diterima. Ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Kaimana. Hasil ini berarti bahwa penggunaan teknologi informasi pada pemerintah daerah Kabupaten Kaimana berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian [29, 30, 31] yang membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyebab berpengaruhnya pemanfaatan teknologi informasi karena pemerintah daerah dalam menerapkan sistem teknologi informasi dengan lebih baik, sehingga pengelolaan keuangan dan pembuatan laporan keuangan dengan pemanfaatan teknologi informasi mendukung penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Penggunaan komputer sudah tersedia dan tersambung dengan internet dan pegawai telah memanfaatkan fasilitas tersebut secara maksimal.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang [34, 35] yang menyatakan bahwa pemanfaatan sistem informasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan tentang dampak Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Penelitian ini melibatkan 119 responden dari 38 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari pimpinan OPD, Kasubbag keuangan, bendahara, dan APIP/Auditor Internal. Variabel dependen yang digunakan adalah kualitas laporan keuangan yang diukur dengan menggunakan indikator SFAC Nomor 8 yang telah dikembangkan oleh Nkundabanyanga, dkk. [32], sedangkan variabel independennya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengacu pada PP Nomor 60 Tahun 2008 dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dengan menggunakan indikator yang dikembangkan oleh Thompson, dkk. [33].

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pemanfaatan teknologi informasi secara positif dan signifikan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan di Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana. Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti penelitian dilakukan hanya di Kabupaten Kaimana sehingga tidak dapat digeneralisasi dan penelitian ini terbatas pada pendekatan kuantitatif. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas sampel penelitian, menambah variabel independen, dan menggunakan metode penelitian kualitatif atau mixed method.

Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah memberikan kontribusi pada perkembangan literatur akuntansi dalam bidang kualitas laporan keuangan dengan memberikan gambaran tentang dampak SPIP dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mempertahankan kualitas laporan keuangan. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang terkait dengan peningkatan kualitas laporan keuangan. Peran pemerintah dalam mengatur regulasi terkait dengan SPIP dan pemanfaatan teknologi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan

Referensi

- [1] M. Mahmudi, "New Public Management (NPM): Pendekatan Baru Manajemen Sektor Publik," *Sinergi: Kajian Bisnis dan Manajemen*, vol. 6, no. 1, 2003.
- [2] A. E. Saputra and H. Setiyawati, "Factors Affecting The Quality of Cooperative Financial Statements in Indonesia," *IJFMR-International Journal For Multidisciplinary Research*, vol. 5, no. 1, 2023.

- [3] K. Kaimana, "<https://koinfo.kaimanakab.go.id/kabupaten-kaimana-raih-penghargaan-wtp-ix.html>," 26 Mei 2022. [Online]. Available: <https://koinfo.kaimanakab.go.id/kabupaten-kaimana-raih-penghargaan-wtp-ix.html>.
- [4] B. P. Keuangan, "Warta Pemeriksa," September 2022. [Online]. Available: https://www.bpk.go.id/assets/files/magazine/edisi-9-vol-v-september-2022_warta_pemeriksa_1666919058.pdf.
- [5] M. E. Pratiwi, M. Din, R. Masdar, A. M. Amir, F. Zahra, A. Kahar and L. Meldawati, "Utilization of information technology to increase human resources capacity and internal control systems on local government financial reporting information," *Academy of Entrepreneurship Journal*, vol. 22, pp. 1-11, 2022.
- [6] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure," *Journal of financial economics*, vol. 3, no. 4, pp. 305-360, 1976.
- [7] W. F. Messier, S. M. Glover and D. F. Prawitt, *Auditing & assurance services: A systematic approach*, Boston, MA: McGraw-Hill Irwin, 2008.
- [8] N. Rashid, W. N. W. Daud, F. A. Zainol, F. Salleh, A. S. Yazid, W. A. Endut, N. Yaakub, P. L. Ghazali and A. Afthanorhan, "Quality of financial reporting towards the improvement corporate governance mechanism," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, vol. 8, no. 11, pp. 1339-1345, 2018.
- [9] J. Renkas, O. Goncharenko and O. a Lukianets, "Quality of financial reporting: approaches to measuring," *International Journal of Accounting and Economics Studies*, vol. 4, no. 1, pp. 1-5, 2016.
- [10] A. A. Gafar and M. Arifuddin, "The Effect of Competence of Human Resources, The Utilization of Information Technology and the Optimization of Asset Management on Quality of Financial Reporting by Moderated the Effectiveness of Internal Control," 2019.
- [11] S. Ayem and I. Husen, "'Pengaruh Kompetensi Sdm, Penerapan Sap Berbasis Akrua, Simda, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Relevansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada SKPD Kantor Walikota Yogyakarta," *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, vol. 25, no. 1, pp. 60-73, 2017.
- [12] P. Alminanda and M. Marfuah, "Peran komitmen organisasi dalam memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," *Jurnal Analisis Bisnis Ekonomi*, vol. 16, no. 2, pp. 117-132, 2018.
- [13] Hanalir, N. Dali and Husin, "Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna)," *JPEP*, vol. 3, no. 1, 2018.
- [14] M. Mildamayanti, M. Abdullah and M. Akib, "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah," *JPEP (Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan)*, vol. 3, no. 2, 2018.
- [15] N. A. Ridzal, I. W. Sujana and E. Malik, "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Buton Selatan," *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, vol. 6, no. 3, pp. 3094-3104, 2022.

- [16] R. Dewi and J. Hoesada, "The Effect of Government Accounting Standards, Internal Control, Systems, Competence of Human Resources, and Use of Information Technology on Quality of Financial Statements," *International Journal Of Innovative Research And Advanced Studies (IJIRAS)*, vol. 7, no. 1, pp. 4-10, 2020.
- [17] M. K. D. Utami, *The Impact Of Human Resources Quality, Internal Control System, And Information Technology Toward Government financial reporting quality of sidoarjo*, Universitas Airlangga, 2018.
- [18] R. Lestari, "The Analysis of The Quality Influencing Factors of Regional Government Financial Reports and the Implication Towards the Government Employee Performance of Lampung Province Government," *International Journal of Economics, Business, and Entrepreneurship*, vol. 4, no. 1, pp. 8-12, 2021.
- [19] I. Wijaya and N. Pratiwi, "Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan," *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 2021.
- [20] S. H. Purba, Erlina and Tarmizi., "The Effect of the Utilization of Information Technology, Human Resources Capacity, and Internal Control Systems on the Quality of Financial Reports for the Local Government of Serdang Bedagai District with Leadership Style as a Moderating Variable," *International Journal of Research and Review*, 2022.
- [21] M. Sutrisna, Nadirsyah and Indayani, "The Effect of Human Resource Competence, Utilization of Information Technology, Internal Control Systems, and Application of Government Accounting Standards on The Quality of Financial Reporting (Study on South Aceh Government SKPK)," *International Journal of Business, Economics, and Social Development*, vol. 3, no. 3, pp. 124-134, 2022.
- [22] A. N. Vijayakumar and N. Nagaraja, "Internal Control Systems: Effectiveness of Internal Audit in Risk Management at Public Sector Enterprises," *BVIMR Management Edge*, vol. 5, no. 1, 2012.
- [23] S. Yensi, H. Amir and Y. Anisma, "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistme akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian intern (internal audit) terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada SKPD Kabupaten Kuantan Singingi)," *JOM FEKON*, vol. 1, no. 1, pp. 1-15, 2014.
- [24] N. M. Sudiarianti, I. G. K. A. Ulupui and I. G. A. Budiasih, "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah," in *Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 2015.
- [25] L. Puspitawati, "The Analysis of Effectiveness Measurement In Accounting Information Systems Through Competence Factor Of Information System User-Research on Higher Education in Bandung," *International Journal Of Applied Business And Economic Research-serials publications*, vol. 14, pp. 815-841, 2016.
- [26] D. Indriasari and M. S. Nahartyo, "Pengaruh kapasitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah :: Studi pada Pemerintah Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Ilir," 2008.
- [27] M. L. Dashtbayaz, M. Salehi and T. Safdel, "The effect of internal controls on financial reporting quality in Iranian family firms," *Journal of Family Business Management*, vol. 9, no. 3, pp. 254-270, 2019.

- [28] G. H. Bodnar and W. S. Hopwood, *Accounting Information Systems*, Pearson, 2006.
- [29] F. C. Pradono, "Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah: Faktor yang mempengaruhi dan Implikasi Kebijakan (Studi Pada SKPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)," *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, vol. 22, no. 5, 2015.
- [30] K. A. S. Wibawa, N. K. Sinarwati and G. A. Yuniarta, "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada Skpd Kabupaten Buleleng," *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, vol. 8, no. 2, 2017.
- [31] Nurillah, A. Syifa and D. Muid, "Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (sakd), pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi empiris pada SKPD Kota Depok)," *Diponegoro Journal of Accounting*, vol. 3, no. 2, pp. 200-212, 2014.
- [32] S. K. Nkundabanyanga, V. Tauringana, W. Balunywa and S. N. Emitu, "The association between accounting standards, legal framework and the quality of financial reporting by a government ministry in Uganda," *Journal of Accounting in Emerging Economies*, vol. 3, no. 1, pp. 65-81, 2013.
- [33] R. L. Thompson, C. A. Higgins and J. M. Howell, "Personal computing: Toward a conceptual model of utilization," *MIS Quarterly*, pp. 125-143, 1991.
- [34] L. Setyowati, W. Isthika and R. D. Pratiwi, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang," *Kinerja*, vol. 20, no. 2, pp. 179-191, 2016.
- [35] Nurlis and W. Yadiati, "The Influence of Internal Control Effectiveness, Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City)," *Research Journal of Finance and Accounting*, vol. 8, pp. 111-124, 2017.